

LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Audited)



20
25



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpinang, 15 Januari 2026



Kepala Sekretariat,

Sulaiman, S.Sos

Pembina/IV.a

NIP. 198007202010011014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	1
II. Neraca.....	1
III. Laporan Operasional.....	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	3
V. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
A. Penjelasan Umum.....	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
F. Pengungkapan Penting Lainnya	29
VI. Lampiran.....	33

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)
Bawaslu Kota Tanjungpinang 2025
Halaman iii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

Kepala Sekretariat,



Sulaiman, S.Sos
Pembina/IV.a
NIP. 198007202010011014

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Bawaslu Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.002.154.599,- atau mencapai 97.74% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.094.746.000,-

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp161,105,500,- yang terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp167.415.200,- dan Aset Lancar sebesar Rp0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp161,105,500,-

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.917.982.023,- sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp(3.917.982.023)

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos - pos Luar Biasa masing - masing sebesar Rp2.568.008,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.915.414.015,-)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp881.870.144,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(3.915.414.015,-) dikurangi koreksi lain-lain sebesar Rp151.310.315,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.331.933.862,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp147.079.676.-

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun periode berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG**

TAHUN 2025

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG **LAPORAN REALISASI ANGGARAN** **PER 31 DESEMBER 2025**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2.568.008	0%	0,00
Jumlah Pendapatan		-	2.568.008	0%	0,00
BELANJA					
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.2	2.022.361.000	1.944.992.566	96,17	64.746.000
Belanja Barang	B.3	1.958.885.000	1.944.964.033	99,29	731.165.708
Jumlah Belanja Operasional		3.981.246.000	3.889.956.599	97,70	795.911.708
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.4	113.500.000	112.198.000	98,85	0,00
Jumlah Belanja Modal		113.500.000	112.198.000	98,85	0,00
JUMLAH BELANJA		4.094.746.000	4.002.154.599	97,74	0,00

II. NERACA

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	818.963.044
Belanja Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	818.963.044
ASET TETAP			
Tanah	C.1	10.000.000	10.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2	659.481.413	664.556.114
Akumulasi Penyusutan	C.3	(522.175.913)	(611.649.014)
Jumlah Aset Tetap		147.305.500	62.907.100
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4	13.800.000	0,00
Aset Lain-Lain	C.5	117.272.701	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.6	(117.272.701)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		13.800.000	0,00
JUMLAH ASET		161.105.500	881.870.144
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	C.7	225.824	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.8	13.800.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		14.025.824	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.9	147.079.676	881.870.144
JUMLAH EKUITAS		147.079.676	881.870.144
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		161.105.500	881.870.144

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00
BEBAN		
Beban Pegawai	1.945.218.390	64.746.000
Beban Persediaan	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	998.078.742	308.101.108
Beban Pemeliharaan	48.145.000	19.395.000
Beban Perjalanan Dinas	898.740.291	403.669.600
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.799.600	18.138.570
JUMLAH BEBAN	3.917.982.023	814.050.278
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.917.982.023)	(814.050.278)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	2.568.000	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.568.000	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	2.568.008	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

URAIAN	2025	2024
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	8	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.568.008	0.00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.915.414.015)	(814.050.278)
POS LUAR BIASA	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO	(3.915.414.015)	(814.050.278)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG LAPORAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	881.870.144	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.915.414.015)	(814.050.278)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(151.310.315)	1.335.000
Penyesuaian Nilai Aset			
Koreksi Nilai Persediaan			
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	0.00	1.335.000
Koreksi Lain-Lain	E.3.3	(151.310.315)	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.331.933.862	1.694.585.422
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	(3.334.501.870)	0.00
Diterima dari Entitas Lain		0.00	(0.00)
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.2	2.568.008	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0.00	0.00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL		0.00	0.00
Transfer Masuk	E.4.3	0.00	0.00
Transfer Keluar		0.00	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(734.790.468)	881.870.144
EKUITAS AKHIR	E.6	147.079676	881.870.144

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-27/PB/PB.6/2023 Hal Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga.
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686239/2024 Tanggal 28 November 2024.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

Penjelasan Visi:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu

oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu

Kota Tanjungpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diterapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi yang didukung dengan sistem sakti. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan - LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

- c. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (SPHL/SP3HL).
- e. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Belanja disajikan dalam LRA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian. kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12

bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- 6) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa uang pengganti perkara tindak pidana korupsi harus disetorkan selain ke kas negara (kas daerah/BUMN/BUMD) maka tagihan uang pengganti tersebut tidak disajikan pada pos aset lancar di neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria aset tetap walaupun dibeli dari MAK yang bukan peruntukannya, maka barang-barang tersebut tetap dibukukan sesuai dengan substansinya (*substance over form*).
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- 4) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 5) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 6) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan. dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar. Aset Tetap. dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto. yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas. dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas. tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai

buku. yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.568.008.00.-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.002.154.599.- atau 97.74% persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.094.746.000.- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.022.361.000	1.944.992.566	96.17
Belanja Barang (RM)	1.958.885.000	1.944.964.033	99.29
Belanja Modal	113.500.000	112.198.000	98.85
Total Belanja Kotor	4.094.746.000	4.002.154.599	97.74
Pengembalian Belanja	92.591.401	0	0
Total Belanja Bersih	4.094.746.000	4.002.154.599	97.74

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.944.992.566.- atau 96.17 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp2.022.361.000.-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.944.964.033.- atau 99.29 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp1.958.885.000.-. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	493.787.000	490.778.392	99.4
Belanja Barang Non Operasional	64.705.000	57.915.150	89.51
Belanja Jasa	451.426.000	449.385.200	99.55
Belanja Pemeliharaan	48.320.000	48.145.000	99.64
Belanja Perjalanan Dinas	900.710.000	898.801.271	99.78
Total	1.958.885.000	1.945.025.013	99.29

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp113.500.000.- atau 98.85 persen dari anggaran belanja barang sebesar

Rp112.198.000.-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Modal per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.500.000	112.198.000	98.85
Total		112.198.000	98.85

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp693.980.413.- Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

132111	Peralatan dan Mesin			
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	10	39.081.000
3050104007	Brandkas	Buah	1	4.580.000
3050104025	Lemari Katalog	Buah	6	15.000.000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	6	11.865.000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	5.945.000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	4.485.000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	7.200.000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5.240.001
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	634.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	32	70.046.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	59	59.389.000
3050201005	Sice	Buah	4	23.840.000
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	23.300.000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	4.970.000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3.260.001
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2.500.000
3050204004	A.C. Split	Buah	11	54.612.502
3050206008	Sound System	Buah	2	11.963.001
3050206016	Mic Conference	Buah	2	18.200.000
3050206020	Camera Video	Buah	1	15.805.000
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	24.198.000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	9.943.708
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	2	2.400.000
3060101079	Microphone Cable	Buah	1	1.000.000
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	1.900.000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15.000.000
3060102132	Video Conference	Buah	1	25.000.001
3060102165	Camera Conference	Buah	1	1.230.000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	3.444.000

3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	2.676.000
3100102001	P.C Unit	Buah	9	85.618.800
3100102002	Lap Top	Buah	7	104.692.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	11.392.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	22.099.200
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4.299.200
JUMLAH			184	693.980.413

C.2 Persediaan

Saldo Persediaan periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00.

C.3 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 10.000.000.00 dan Saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Saldo Tanah per 31 Desember 2025

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Saldo
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	10.000.000
Total			1	10.000.000

C.4 Akumulasi penyusutan aset tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (522.175.913) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode yang berakhir 31 Desember 2025. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6
Rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
132111	Peralatan dan Mesin					
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	10	39.081.000	(39.081.000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	4.580.000	(4.580.000)	0
3050104025	Lemari Katalog	Buah	6	15.000.000	(15.000.000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	6	11.865.000	(11.865.000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	5.945.000	(5.945.000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	4.485.000	(4.485.000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	7.200.000	(2.880.000)	4.320.000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5.240.001	(5.240.001)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	32	70.046.000	(70.046.000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	11	27.424.000	(27.424.000)	0
3050201005	Sice	Buah	4	23.840.000	(23.840.000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	23.300.000	(23.300.000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	4.970.000	(4.970.000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3.260.001	(3.260.001)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2.500.000	(750.000)	1.750.000
3050204004	A.C. Split	Buah	11	54.612.502	(54.612.502)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	11.963.001	(11.963.001)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	2	18.200.000	(18.200.000)	0
3050206020	Camera Video	Buah	1	15.805.000	(15.805.000)	0
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	24.198.000	(2.419.800)	21.778.200
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	9.943.708	(9.943.708)	0
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	2	2.400.000	(2.400.000)	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	1	1.000.000	(1.000.000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15.000.000	(1.500.000)	13.500.000
3060102132	Video Conference	Buah	1	25.000.001	(2.500.000)	22.500.001
3060102165	Camera Conference	Buah	1	1.230.000	(861.000)	369.000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	3.444.000	(1.033.200)	2.410.800
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	2.676.000	(2.676.000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	9	85.618.800	(85.618.800)	0
3100102002	Lap Top	Buah	7	101.863.999	(31.832.750)	70.031.249
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	11.392.000	(11.392.000)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	22.099.200	(21.452.950)	646.250
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4.299.200	(4.299.200)	0
JUMLAH			133	659.481.413	(522.175.913)	147.305.500

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 147.079.676 Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset senilai Rp. 161,105,500 dan kewajiban senilai Rp. 14.025.824. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp998.078.742 atau 61.8 %, dengan rincian anggaran dan realisasi beban per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi beban per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Beban Pegawai	2.022.361.000	1.944.922.566	96.17
Beban Barang (RM)	1.958.885.000	1.944.964.033	99.29
Beban Modal	113.500.000	112.198.000	98.85
Total Beban	4.094.756.000	4.002.154.599	97.74

D.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO untuk per 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.9.17.982.023).

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Kementerian/Lembaga adalah kekayaan bersih Kementerian/Lembaga yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.881.870.144.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.915.414.015). Defisit Laporan Operasional merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp3.331.933.862.-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp147.079.676.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan. Tugas. Fungsi. Wewenang. Organisasi. Tata Kerja. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Bagian Administrasi. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.

Berikut Struktur Pengelola Keuangan di Bawaslu Kota Tanjungpinang dan terdapat beberapa kali perubahan disampaikan sebagaimana berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang nomor : 001/KU.01.00/KR-06/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

A. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : **Buana Fauzi Februari. SE.. SH.. MM**
 - 2) PPSPM : **Khairul. SE**
 - 3) Bendahara Pengeluaran : **Bambang Raharjo. S.Sos**
 - 4) Staf Pengelola Keuangan : **Mukhlis. SE**
 - 5) Staf Pengelola BMN : **Irma Aprilliana. SE**
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang nomor : 073/KU.01.00/KR-06/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

B. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : **Sulaiman. S.Sos**
- 2) PPSPM : **Khairul. SE**
- 3) Staf Pengelola Keuangan : **Mukhlis. SE**
- 4) Staf Pengelola BMN : **Dede Nugraha Sukandar. S.AP**

3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang nomor : 073/KU.01.00/KR-06/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

C. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : **Sulaiman. S.Sos**
- 2) PPSPM : **Dwi Suharani Raja Guk Guk. SE**
- 3) Bendahara Pengeluaran : **Khairul. SE**
- 4) Staf Pengelola Keuangan : **Mukhlis. SE**
- 5) Staf Pengelola BMN : **Dede Nugraha Sukandar. S.AP**

4. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang nomor : 034/KU.01.00/KR-06/107/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

D. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : **Sulaiman. S.Sos**
- 2) PPSPM : **Dwi Suharani Raja Guk Guk. SE**
- 3) Bendahara Pengeluaran : **Grace Usniarta Sihombing. S.Tr.Akun**
- 4) Staf Pengelola Keuangan : **Mukhlis. SE**
- 5) Staf Pengelola BMN : **Dede Nugraha Sukandar. S.AP**

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1 rekening yaitu Rekening (BPG).

2. Pejabat Perbendaharaan

Adapun pejabat perbendaharaan per tanggal 31 Desember 2025 selaku Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM. dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 8
Pejabat Perbendaharaan

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1	Sulaiman. S.Sos	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Sulaiman. S.Sos	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Dwi Suharani Raja Guk Guk. SE	Penandatangan SPM
4	Grace Usniarta Sihombing. S.Tr.Akun	Bendahara Pengeluaran

F.3 Capaian Output

Capaian Output Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Capaian Output untuk Kegiatan Pelaksanaan Non Tahapan

Tabel 9
Rincian Capaian Output

No.	Kode	Kegiatan	Persen Realisasi
1	CQ.5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	47.56
2	CQ.5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	94.48
3	CQ.5245.BIC.003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota- Kabupaten/Kota 01	100
4	CQ.7014.QIC.002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	99.44
5	WA.4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	78.37

6	WA.4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	95.85
7	WA.4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	0
8	WA.6849.EBA.956	Layanan BMN	78.37
9	WA.6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	97.01
10	WA.6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal	98.85
11	WA.6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.33
12	WA.6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100
13	WA.6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	100
14	WA.6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	9.46
15	WA.6850.EBA.957	Layanan Hukum	71.65
16	WA.6850.EBA.962	Layanan Umum	99.41
17	WA.6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	0
18	WA.6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	96.59

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 3200

SATUAN KERJA : 419772

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl. Cetak 30/04/2026 10:04 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	818,963,044	0
0.0	131111	Tanah	10,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	664,556,114	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	611,649,014
0.0	391111	Ekuitas	0	881,870,144
JUMLAH			1,493,519,158	1,493,519,158

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,002,154,599
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,568,008	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,568,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	110,791,060	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,054	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,959,122	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,871,649	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,250,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	207,597	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	7,748,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	34,893,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	3,885,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	462,083,100	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	446,408,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,758	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,310,970	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	9,123,942	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	26,275,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	28,885,375	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	90,876,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	12,970,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	10,909,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	21,688,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	169,506,629	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	456,525,566	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	404,361,892	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55,604,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,812,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	47,909,885	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,005,265	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	39,004,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	307,080,600	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	31,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	71,500,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,145,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227,178,849	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,910,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:49 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	334,508,500	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	283,203,922	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112,198,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	196
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	60,980
JUMLAH			4,004,968,783	4,004,968,783

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN

198007202010011014

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	10,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	659,481,413	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	522,175,913
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	13,800,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	117,272,701	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	117,272,701
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	225,824
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	13,800,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,334,501,870
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,568,008	0
0.0	391111	Ekuitas	0	881,870,144
0.0	391119	Koreksi Lainnya	151,310,315	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,568,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	110,791,060	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,858	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,959,122	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,871,649	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,250,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	207,597	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	7,748,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	34,893,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	3,700,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	462,083,100	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	446,609,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,790	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,331,130	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	9,127,974	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	26,275,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	28,885,375	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	90,876,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	12,970,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	10,909,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	21,688,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	169,506,629	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	456,525,566	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	404,361,892	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55,604,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:48 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	30,812,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	47,909,885	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,005,265	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	39,004,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	307,080,600	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	31,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	71,500,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,145,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	227,178,849	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,910,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	334,508,500	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	283,142,942	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27,799,600	0
JUMLAH			4,872,414,460	4,872,414,460

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN

NIP 198007202010011014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG 419772

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:47 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	2,568,008	2,568,008	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	2,568,008	2,568,008	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	2,568,008	2,568,008	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,094,746,000	4,002,154,599	(92,591,401)	98	1,287,886,000	795,911,708	491,974,292	62
1. Belanja Pegawai	2,022,361,000	1,944,992,566	(77,368,434)	96	64,830,000	64,746,000	84,000	100
2. Belanja Barang	1,958,885,000	1,944,964,033	(13,920,967)	99	1,223,056,000	731,165,708	491,890,292	60
3. Belanja Modal	113,500,000	112,198,000	(1,302,000)	99	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG 419772

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:47 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,094,746,000	4,002,154,599	(92,591,401)	98	1,287,886,000	795,911,708	491,974,292	62
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN
NIP 198007202010011014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 3200 **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : 419772 **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 8:52 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	24,889,000	111,869,000	110,791,060	0	110,791,060	99.04	1,077,940
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,000	59,000	2,054	196	1,858	3.15	57,142
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,368,000	8,061,000	7,959,122	0	7,959,122	98.74	101,878
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,424,000	4,380,000	2,871,649	0	2,871,649	65.56	1,508,351
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	11,760,000	12,740,000	12,250,000	0	12,250,000	96.15	490,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,810,000	10,879,000	207,597	0	207,597	1.91	10,671,403
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,336,000	8,103,000	7,748,940	0	7,748,940	95.63	354,060
511129	Belanja Uang Makan PNS	26,640,000	43,534,000	34,893,000	0	34,893,000	80.15	8,641,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,480,000	3,885,000	3,885,000	185,000	3,700,000	95.24	185,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	77,715,000	203,510,000	180,608,422	185,196	180,423,226	88.66	23,086,774
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	456,712,000	462,935,000	462,083,100	0	462,083,100	99.82	851,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	456,712,000	462,935,000	462,083,100	0	462,083,100	99.82	851,900
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	162,135,000	450,461,000	446,408,000	0	446,408,000	99.1	4,053,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48,000	144,000	7,758	0	7,758	5.39	136,242
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,408,000	37,960,000	29,310,970	0	29,310,970	77.22	8,649,030
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	7,760,000	16,548,000	9,123,942	0	9,123,942	55.14	7,424,058
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	35,640,000	26,275,000	26,275,000	0	26,275,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20,440,000	30,733,000	28,885,375	0	28,885,375	93.99	1,847,625
511628	Belanja Uang Makan PPPK	53,280,000	99,900,000	90,876,000	0	90,876,000	90.97	9,024,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	13,135,000	12,970,000	0	12,970,000	98.74	165,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	294,711,000	675,156,000	643,857,045	0	643,857,045	95.36	31,298,955
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	13,716,000	13,716,000	10,909,000	0	10,909,000	79.53	2,807,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	20,952,000	31,040,000	21,688,000	0	21,688,000	69.87	9,352,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	34,668,000	44,756,000	32,597,000	0	32,597,000	72.83	12,159,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	121,632,000	172,075,000	169,506,629	0	169,506,629	98.51	2,568,371
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	278,796,000	463,929,000	456,525,566	0	456,525,566	98.4	7,403,434
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	400,428,000	636,004,000	626,032,195	0	626,032,195	98.43	9,971,805
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,264,234,000	2,022,361,000	1,945,177,762	185,196	1,944,992,566	96.17	77,368,434

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 419772
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 8:52 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	765,288,000	404,787,000	404,361,892	0	404,361,892	99.89	425,108
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000	258,000	0	0	0	0	258,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	90,384,000	56,054,000	55,604,000	0	55,604,000	99.2	450,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,812,000	32,625,000	30,812,500	0	30,812,500	94.44	1,812,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	878,496,000	493,724,000	490,778,392	0	490,778,392	99.4	2,945,608
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	45,402,000	54,699,000	47,909,885	0	47,909,885	87.59	6,789,115
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	10,006,000	10,005,265	0	10,005,265	99.99	735
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	45,402,000	64,705,000	57,915,150	0	57,915,150	89.51	6,789,850
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	42,000,000	39,480,000	39,004,600	0	39,004,600	98.8	475,400
522112	Belanja Langganan Telepon	7,012,000	0	0	0	0	0	0
522113	Belanja Langganan Air	5,400,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	7,920,000	0	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	592,800,000	307,086,000	307,080,600	0	307,080,600	100	5,400
522151	Belanja Jasa Profesi	82,400,000	31,800,000	31,800,000	0	31,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	71,860,000	71,500,000	0	71,500,000	99.5	360,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	737,532,000	451,426,000	449,385,200	0	449,385,200	99.55	2,040,800
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166,450,000	48,320,000	48,145,000	0	48,145,000	99.64	175,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	166,450,000	48,320,000	48,145,000	0	48,145,000	99.64	175,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	435,000,000	227,227,000	227,178,849	0	227,178,849	99.98	48,151
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	105,000,000	54,070,000	53,910,000	0	53,910,000	99.7	160,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	335,324,000	334,508,500	0	334,508,500	99.76	815,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84,390,000	284,089,000	283,203,922	60,980	283,142,942	99.67	946,058
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	624,390,000	900,710,000	898,801,271	60,980	898,740,291	99.78	1,969,709
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,452,270,000	1,958,885,000	1,945,025,013	60,980	1,944,964,033	99.29	13,920,967
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	113,500,000	112,198,000	0	112,198,000	98.85	1,302,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	113,500,000	112,198,000	0	112,198,000	98.85	1,302,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 3200 **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : 419772 **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 8:52 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	113,500,000	112,198,000	0	112,198,000	98.85	1,302,000
	JUMLAH BELANJA	3,716,504,000	4,094,746,000	4,002,400,775	246,176	4,002,154,599	97.74	92,591,401

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	818,963,044	(818,963,044)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	818,963,044	(818,963,044)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	10,000,000	10,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	659,481,413	664,556,114	(5,074,701)	(0.76)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(522,175,913)	(611,649,014)	89,473,101	(14.63)
JUMLAH ASET TETAP	147,305,500	62,907,100	84,398,400	134.16
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	13,800,000	0	13,800,000	0.00
Aset Lain-lain	117,272,701	0	117,272,701	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(117,272,701)	0	(117,272,701)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	13,800,000	0	13,800,000	
JUMLAH ASET	161,105,500	881,870,144	(720,764,644)	(81.73)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	14,025,824	0	14,025,824	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,025,824	0	14,025,824	
JUMLAH KEWAJIBAN	14,025,824	0	14,025,824	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	147,079,676	881,870,144	(734,790,468)	(83.32)
JUMLAH EKUITAS	147,079,676	881,870,144	(734,790,468)	(83.32)
JUMLAH EKUITAS	147,079,676	881,870,144	(734,790,468)	(83.32)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	161,105,500	881,870,144	(720,764,644)	(81.73)

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN

NIP 198007202010011014

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:45 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,945,218,390	64,746,000	1,880,472,390	2,904.384
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	998,078,742	308,101,108	689,977,634	223.945
Beban Pemeliharaan	48,145,000	19,395,000	28,750,000	148.234
Beban Perjalanan Dinas	898,740,291	403,669,600	495,070,691	122.643
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (3200) **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : (419772) **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG**

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:45 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27,799,600	18,138,570	9,661,030	53.262
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,917,982,023	814,050,278	3,103,931,745	381.295
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,917,982,023)	(814,050,278)	(3,103,931,745)	381.295
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	2,568,000	0	2,568,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	2,568,000	0	2,568,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8	0	8	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8	0	8	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,568,008	0	2,568,008	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,915,414,015)	(814,050,278)	(3,101,363,737)	380.979
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,915,414,015)	(814,050,278)	(3,101,363,737)	380.979

Keterangan :
FINAL

TANJUNGPINANG, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN
NIP 198007202010011014

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:46 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	881,870,144	0	881,870,144	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,915,414,015)	(814,050,278)	(3,101,363,737)	380.98
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(151,310,315)	1,335,000	(152,645,315)	(11,434.11)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	1,335,000	(1,335,000)	(100)
LAIN-LAIN	(151,310,315)	0	(151,310,315)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,331,933,862	1,694,585,422	1,637,348,440	96.62
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(734,790,468)	881,870,144	(1,616,660,612)	(183.32)
EKUITAS AKHIR	147,079,676	881,870,144	(734,790,468)	(83.32)

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN

NIP 198007202010011014

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 419772 **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG**

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 7:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		2,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	2,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
132111	Peralatan dan Mesin		133	659,481,413	(611,649,014)	89,473,101	(522,175,913)	137,305,500
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	10	39,081,000	(39,081,000)	0	(39,081,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	4,580,000	(4,580,000)	0	(4,580,000)	0
3050104025	Lemari Katalog	Buah	6	15,000,000	(15,000,000)	0	(15,000,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	6	11,865,000	(11,865,000)	0	(11,865,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	5,945,000	(5,945,000)	0	(5,945,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	4,485,000	(10,452,500)	5,967,500	(4,485,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	7,200,000	(9,040,000)	6,160,000	(2,880,000)	4,320,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5,240,001	(5,240,001)	0	(5,240,001)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	32	70,046,000	(77,846,000)	7,800,000	(70,046,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	11	27,424,000	(38,074,000)	10,650,000	(27,424,000)	0
3050201005	Sice	Buah	4	23,840,000	(23,840,000)	0	(23,840,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	23,300,000	(23,300,000)	0	(23,300,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	4,970,000	(4,970,000)	0	(4,970,000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,260,001	(3,260,001)	0	(3,260,001)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2,500,000	(250,000)	(500,000)	(750,000)	1,750,000
3050204004	A.C. Split	Buah	11	54,612,502	(54,612,502)	0	(54,612,502)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	11,963,001	(11,963,001)	0	(11,963,001)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	2	18,200,000	(18,200,000)	0	(18,200,000)	0
3050206020	Camera Video	Buah	1	15,805,000	(15,805,000)	0	(15,805,000)	0
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	24,198,000	0	(2,419,800)	(2,419,800)	21,778,200
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	9,943,708	(9,943,708)	0	(9,943,708)	0
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	2	2,400,000	(2,400,000)	0	(2,400,000)	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	1	1,000,000	(1,000,000)	0	(1,000,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,000,000	(5,468,001)	3,968,001	(1,500,000)	13,500,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	25,000,001	0	(2,500,000)	(2,500,000)	22,500,001
3060102165	Camera Conference	Buah	1	1,230,000	(615,000)	(246,000)	(861,000)	369,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	3,444,000	(344,400)	(688,800)	(1,033,200)	2,410,800
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	2,676,000	(2,676,000)	0	(2,676,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	9	85,618,800	(95,938,800)	10,320,000	(85,618,800)	0
3100102002	Lap Top	Buah	7	101,863,999	(65,448,250)	33,615,500	(31,832,750)	70,031,249
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	11,392,000	(25,101,200)	13,709,200	(11,392,000)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	22,099,200	(25,090,450)	3,637,500	(21,452,950)	646,250
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4,299,200	(4,299,200)	0	(4,299,200)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		24	117,272,701	0	(117,272,701)	(117,272,701)	

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 419772 **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG**

Tgl Data : 08/05/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 7:27 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	5,967,500	0	(5,967,500)	(5,967,500)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	7,600,000	0	(7,600,000)	(7,600,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2	7,800,000	0	(7,800,000)	(7,800,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	4	10,650,000	0	(10,650,000)	(10,650,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	5,468,001	0	(5,468,001)	(5,468,001)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	2	10,320,000	0	(10,320,000)	(10,320,000)	0
3100102002	Lap Top	Buah	6	50,828,000	0	(50,828,000)	(50,828,000)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	13,709,200	0	(13,709,200)	(13,709,200)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	4,930,000	0	(4,930,000)	(4,930,000)	0
JUMLAH			2,157	786,754,114	(611,649,014)	(27,799,600)	(639,448,614)	147,305,500

TANJUNGPINANG, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SULAIMAN, S.Sos
198007202010011014

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 419772 **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG**

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 9:32 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		2,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	2,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
132111	Peralatan dan Mesin		133	659,481,413	(611,649,014)	89,473,101	(522,175,913)	137,305,500
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	10	39,081,000	(39,081,000)	0	(39,081,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	4,580,000	(4,580,000)	0	(4,580,000)	0
3050104025	Lemari Katalog	Buah	6	15,000,000	(15,000,000)	0	(15,000,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	6	11,865,000	(11,865,000)	0	(11,865,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	5,945,000	(5,945,000)	0	(5,945,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	4,485,000	(10,452,500)	5,967,500	(4,485,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	7,200,000	(9,040,000)	6,160,000	(2,880,000)	4,320,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5,240,001	(5,240,001)	0	(5,240,001)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	32	70,046,000	(77,846,000)	7,800,000	(70,046,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	11	27,424,000	(38,074,000)	10,650,000	(27,424,000)	0
3050201005	Sice	Buah	4	23,840,000	(23,840,000)	0	(23,840,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	23,300,000	(23,300,000)	0	(23,300,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	4,970,000	(4,970,000)	0	(4,970,000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,260,001	(3,260,001)	0	(3,260,001)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2,500,000	(250,000)	(500,000)	(750,000)	1,750,000
3050204004	A.C. Split	Buah	11	54,612,502	(54,612,502)	0	(54,612,502)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	11,963,001	(11,963,001)	0	(11,963,001)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	2	18,200,000	(18,200,000)	0	(18,200,000)	0
3050206020	Camera Video	Buah	1	15,805,000	(15,805,000)	0	(15,805,000)	0
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	24,198,000	0	(2,419,800)	(2,419,800)	21,778,200
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	9,943,708	(9,943,708)	0	(9,943,708)	0
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	2	2,400,000	(2,400,000)	0	(2,400,000)	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	1	1,000,000	(1,000,000)	0	(1,000,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,000,000	(5,468,001)	3,968,001	(1,500,000)	13,500,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	25,000,001	0	(2,500,000)	(2,500,000)	22,500,001
3060102165	Camera Conference	Buah	1	1,230,000	(615,000)	(246,000)	(861,000)	369,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	3,444,000	(344,400)	(688,800)	(1,033,200)	2,410,800
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	2,676,000	(2,676,000)	0	(2,676,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	9	85,618,800	(95,938,800)	10,320,000	(85,618,800)	0
3100102002	Lap Top	Buah	7	101,863,999	(65,448,250)	33,615,500	(31,832,750)	70,031,249
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	11,392,000	(25,101,200)	13,709,200	(11,392,000)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	22,099,200	(25,090,450)	3,637,500	(21,452,950)	646,250
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4,299,200	(4,299,200)	0	(4,299,200)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		24	117,272,701	0	(117,272,701)	(117,272,701)	

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 419772 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 9:32 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	5,967,500	0	(5,967,500)	(5,967,500)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	7,600,000	0	(7,600,000)	(7,600,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2	7,800,000	0	(7,800,000)	(7,800,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	4	10,650,000	0	(10,650,000)	(10,650,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	5,468,001	0	(5,468,001)	(5,468,001)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	2	10,320,000	0	(10,320,000)	(10,320,000)	0
3100102002	Lap Top	Buah	6	50,828,000	0	(50,828,000)	(50,828,000)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	13,709,200	0	(13,709,200)	(13,709,200)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	4,930,000	0	(4,930,000)	(4,930,000)	0
JUMLAH			2,157	786,754,114	(611,649,014)	(27,799,600)	(639,448,614)	147,305,500

TANJUNGPINANG, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SULAIMAN, S.Sos
198007202010011014

MONITORING POSISI KAS (RUPIAH MURNI)
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 419772
NAMA SATKER : Bawaslu Kota Tanjungpinang

No	BP/BPP	Saldo Rek Koran Bank (RM) xxxxxxx	Uang Tunai di Brankas xxxxxxx	Uang di BPP xxxxxxx	Jumlah Kas di BP/BPP	Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di Neraca			Jumlah	Selisih	Keterangan Selisih	Tanggal Setor	No Bukti Setor (Jika Ada)
							Sisa LS yang belum disetor/distribusi	Jasa Giro Yang Belum Disetor	Pajak Yang Belum Disetor					
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(6-11)	13	14	15
1	BP Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	-	-	-	-		-	-	-	-	-			
	Jumlah													

Bawaslu Kota Tanjungpinang
Pengguna Anggaran,

NIP.19800720 201001 1 014

USULAN JURNAL PENYESUAIAN SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN ASERSI
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (LKKL) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)

Kode Satker : 419772

Nama Satker : Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang

No	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah	
			Debit	Kredit
1.	NIHIL			

Penanggungjawab,
Kuasa Pengguna Anggaran



SULAIMAN, S.Sos
NIP. 19800720 202010 1 014

Penyusun Laporan Keuangan



MUTIARA SELLYNA, S.E
NIP. 19900615 202321 2 050

JURNAL MANUAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE : 2025-13

KEMENTERIAN : 115

ESELON 1 : 01

WILAYAH/PROPINSI : 3200

SATUAN KERJA : 419772

JENIS KEWENANGAN : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KANTOR SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Kantor Daerah

Tanggal : 11-02-2026

Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2025	004	Pembayaran KGB Pmbulatan Gaji PPPK	419772.009.212111.1150100.0000000.0000000000.000000.2.3252.2.000000.000000	212111	AKRUAL	0	32	Belum
31-12-2025	004	Pembayaran KGB Pmbulatan Gaji PPPK	419772.009.511619.1150100.0000000.0000000000.000000.2.3252.2.000000.000000	511619	AKRUAL	32	0	Belum
31-12-2025	003	Pembayaran KGB Tunjangan Anak PPPK	419772.009.212111.1150100.0000000.0000000000.000000.2.3252.2.000000.000000	212111	AKRUAL	0	4,032	Belum
31-12-2025	003	Pembayaran KGB Tunjangan Anak PPPK	419772.009.511622.1150100.0000000.0000000000.000000.2.3252.2.000000.000000	511622	AKRUAL	4,032	0	Belum
31-12-2025	002	Pembayaran KGB Tunjangan Istri/Suami	419772.009.212111.1150100.0000000.0000000000.000000.2.3252.2.000000.000000	212111	AKRUAL	0	20,160	Belum
31-12-2025	002	Pembayaran KGB Tunjangan Istri/Suami	419772.009.511621.1150100.0000000.0000000000.000000.2.3252.2.000000.000000	511621	AKRUAL	20,160	0	Belum
31-12-2025	001	Pembayaran KGB Gaji Pokok PPPK	419772.009.212111.1150100.0000000.0000000000.000000.2.3252.2.000000.000000	212111	AKRUAL	0	201,600	Belum
31-12-2025	001	Pembayaran KGB Gaji Pokok PPPK	419772.009.511611.1150100.0000000.0000000000.000000.2.3252.2.000000.000000	511611	AKRUAL	201,600	0	Belum
						225,824	225,824	

**DAFTAR UTANG PIHAK KETIGA/TUNGGAKAN
PER DESEMBER 2025**

KODE SATKER : 419772

NAMA SATKER : Bawaslu Kota Tanjungpinang

No	Penerima	Kode Akun	Untuk Pembayaran	Alasan Keterlambatan	Kontrak / Tagihan (jika ada)		Sumber Dana (Hibah/RM)	Jumlah
					Nomor	Tgl		
1	Muklis	511611	Gaji Pokok PPPK	Sk KGB PPPK baru diterima bulan Januari 2026	00012T	15/01/2026	RM	201.600
2	Muklis	511621	Tunjangan Istri/Suami	Sk KGB PPPK baru diterima bulan Januari 2027	00012T	15/01/2026	RM	20.160
3	Muklis	511622	Tunjangan Anak	Sk KGB PPPK baru diterima bulan Januari 2028	00012T	15/01/2026	RM	4.032
4	Muklis	511619	Pembulatan	Sk KGB PPPK baru diterima bulan Januari 2029	00012T	15/01/2026	RM	32
JUMLAH								225.824



Bawaslu Kota Tanjungpinang
Kepala Pengguna Anggaran,

Yusuf Iman, S.Sos

NIP.19800720 201001 1 014



DATA REKAP REKONSILIASI SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

NO	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Pagu Belanja	4.094.746.000	4.094.746.000	0
2	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Belanja	4.002.400.775	4.002.400.775	0
3	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Pengembalian Belanja	-246.176	-246.176	0
4	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Pendapatan Bukan Pajak	2.568.008	2.568.008	0
6	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	11501	419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0